



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
PENGURUS BADAN KOORDINASI (BADKO) HMI SUMATERA BARAT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 07/B/SEK/XI/2024

NOMOR : 012/HK.02/K.SB/11/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sembilan Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (9-11-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SEPRI WANDI : Ketua Umum Badko HMI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badko HMI Sumbar, yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah 158, Kota Padang, Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. ALNI, S.H., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- M.Kn.

Paraf	Paraf
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Barat. Yang mana bertugas sebagai badan koordinasi antara PB HMI dan Cabang-cabang se-Sumatera Barat
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat;
3. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan bekerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Pengurus BADKO HMI Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas dan bermartabat;

Paraf	Paraf
	

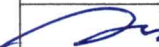
2. Tujuan dari dari Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- b. Meningkatkan peran aktif Pengurus BADKO HMI Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- c. Menciptakan lingkungan yang bebas dari Isu SARA, penyebaran berita hoax, serta praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Ruang Lingkup BADKO HMI Sumatera Barat, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, meliputi:
 - a. Bidang Pelajar;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pengembangan Kader;
 - d. Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia;
 - e. Sumbangsih peran dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan keagamaan;
2. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi BADKO HMI Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan;
3. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
- b. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Ruang Lingkup BADKO HMI Sumatera Barat, yang meliputi Mahasiswa, pendidikan, pemberdayaan kader, pengembangan sumber daya manusia, sumbangsih peran dalam berbangsa dan bernegara serta pengabdian kepada masyarakat.
- c. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerjasama

2. KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
- b. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung.
- c. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA : Ketua Umum Badko HMI Sumateta Barat
Alamat : Jl. Hang Tuah 158
Kontak Person : Sepri Wandu
Telepon : 081283530518
e-mail : Fisepriwandi15@gmail.com

Paraf	Paraf
	

b. PIHAK KEDUA : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belant
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
Kontak Person : Muhamad Khadafi, S.Kom. (Koordinator Divisi Pencegahan
Hubungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat)
Telepon : 0813-7435-7818
e-mail : hubalbawaslusumbar@gmail.com

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Nota Kesepahaman ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerja sama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung.

Paraf	Paraf
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai force majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tertunda akibat dari force majeure tersebut.

Paraf	Paraf
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Pengurus Badan Koordinasi (BADKO) HMI
Sumatera Barat



SEPRI WANDI
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



ALNI, S.H., M.Kn.
Ketua